

# Kliping Berita UM



um  
The Learning  
University



Jawa Pos Radar Malang 22 Maret 2018

## Akbar Rahmada Maulana, Mahasiswa UM yang Wakili Asia di PBB Jadi Negosiator 180 Negara, Aktif Tangani Kemiskinan di Asia-Afrika



**HARUKAN BANGSA:**  
Akbar Rahmada Maulana di sela-sela pelaksanaan kegiatan United Nation Major Group for Children and Youth.

Usianya baru 20 tahun. Tapi, Akbar Rahmada Maulana sudah dipercaya mewakili Asia di PBB. Menjadi negosiator 180 negara, banyak permasalahan negara yang sudah dia tuntaskan. Bagaimana kisahanya?

SANDRA DESI CAESARIA

**SUARANYA** terdengar merdu. Nyaris seperti penyiar radio. Itulah kesan saat *Jawa Pos Radar Malang* berkomunikasi dengan Akbar Rahmada Maulana. ▶ *Baca Jald...* Hal 7

## Jadi Negosiator 180 Negara, Aktif Tangani Kemiskinan di Asia-Afrika

Sambungan dari hal 1

Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) itu ditunjuk Perwakilan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi permasalahan di berbagai negara. "Ada sepuluh orang di Asia (yang tergabung di tim PBB). Termasuk saya," ujar Akbar kemarin (21/3). Mahasiswa jurusan bahasa Inggris itu tidak menyangka dipercaya lembaga internasional. Malanya, dia iseng-iseng mengikuti United Nation Habitat III Conference di Surabaya Februari lalu. Ternyata Akbar malah mendapatkan tawaran bergabung di United Nation Major Group for Children and Youth, lembaga di bawah naungan PBB yang khusus berisi anak muda. Di Indonesia, hanya Akbar yang terpilih. Padahal, ada ratusan mahasiswa yang ingin bergabung. "Saya kira delegasi Indonesia. Ternyata saya juga ditunjuk menjadi representative of Asian oleh PBB," tutur pria berusia 20 tahun itu.

Selain Akbar, personel lain yang mewakili Asia berasal dari

Filipina, Jepang, dan India. Setiap benua terdiri dari sepuluh personel. Demikian juga wakil dari Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika. Tugas Akbar dan delegasi benua lain adalah menjadi negosiator andal untuk 180 negara di bawah naungan PBB. "Ada setidaknya tiga program yang ditawarkan. Pertama formal negosiasi, informal negosiasi, dan *social media influence*," kata pria asal Kediri itu.

Setiap personel yang ditunjuk membuat grup diskusi bersama dan harus membedah satu proposal yang memuat masalah penting antarnegara. "Kami dituntut *me-review* kata-kata yang ada dalam proposal dan juga melihat bahasa yang dipakai orang selama menjadi negosiator," katanya.

Misalnya, masalah tidak boleh disebut "problem", tapi harus disebut *issue*. Sebab penyebutan itu berdampak terhadap proses penyelesaiannya. Hasilnya, Akbar bersama teman-temannya berhasil memecahkan masalah. Di antaranya, berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan

di Asia dan Afrika.

"Ada satu kasus di Cimsa (Center for Indonesian Medical Students' Activities) yang harus diselesaikan. Tapi, ini sifatnya tertutup," kata Akbar yang tidak menyebutkan secara detail kasus apa yang dia maksudkan. Pemecahan kasus itu menentukan perjalanan Akbar dan teman-temannya sebelum dikirim langsung ke kantor pusat PBB di New York.

Kini, Akbar dan timnya masih di Malaysia. Dia bertugas membuat aturan internasional yang akan diratifikasi (disahkan) di Quito (ibu kota negara Ekuador). "Sebenarnya, tugas saya dan kawan-kawan selama di Malaysia tidak hanya membuat aturan. Tapi, juga mengawasi jalannya peraturan di 180 negara yang setuju dengan konsep Sustainable Development Goals (SDG atau program pembangunan berkelanjutan antar negara)," ujar anak kedua dari dua bersaudara ini.

Akbar menjelaskan, momen menegangkan dan menarik ketika proses ratifikasi SDG.

"Pada Tracoom pertama dan kedua, negosiasi ini *deadlock*, artinya masih buntu. Lalu diadakan lagi dan jalannya ratifikasi SDG ini sangat seru," tambah Akbar.

Pria yang juga berprestasi di bidang debat dan gemar menulis jurnal ini menceritakan pengalamannya di Quito. Dia menegakkan, Amerika dan Inggris sempat menolak untuk menandatangani aturan SDG. Alasannya sepele. Yakni, aturan yang diusulkan itu diinisiasi delegasi dari Asia dan Afrika. "Sering kali ketika ada momen ratifikasi, ada pihak-pihak yang membawa unsur politis. Misalnya Amerika dan Inggris beranggapan bahwa SDG ini sumber cari duitnya negara berkembang," jelasnya. Tugasnya tidak berhenti sampai kasus SDG saja. Dia dan teman-teman antarnegara itu masih berkontribusi secara internasional hingga pemilihan berikutnya. "Pemilihannya lima tahun sekali. Untuk 2018 itu yang pertama dan kami berkesempatan bisa bekerja secara profesional," tuturnya. (\*/c2/dan)



um  
The Learning  
University

Humas Universitas Negeri Malang (UM)